



Volume 9 No. 2 April 2024
p-ISSN: 2477-8192 dan e-ISSN: 2502-2776

Kajian Pengembangan Kurikulum Maritim dalam Menumbuhkan Rasa Cinta Bahari Siswa

Muhamad Faiz Prasetya¹, Enok Maryani², Mamat Ruhimat³

¹Program Studi Pendidikan Geografi
Universitas Pendidikan Indonesia
Email: faizprasetya@upi.edu

²Program Studi Pendidikan Geografi
Universitas Pendidikan Indonesia
Email: enokmaryani@upi.edu

³Program Studi Pendidikan Geografi
Universitas Pendidikan Indonesia
Email: mamatruhimat@upi.edu

(Received: 13 Juli 2023; Accepted: 20 Maret 2024; Published: 1 April 2024)



©2019 – Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0 (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0>).

ABSTRACT

This research is carried out in order to study the development of ideas or curriculum policies in the field of maritime which is indeed a need of the public in particular who reside in the northern coastal area of Subang County This curriculum is an effort to support one of Indonesia's dreams of becoming the largest archipelagic country and the World Maritime Poros. The maritime curriculum program is a policy that aims to introduce the potential of maritime affairs and fisheries in Indonesia's coastal areas to the younger generation, in order to awaken the spirit of love for the sea in coastal communities, especially for students in coastal schools. The research method used is the study of literature studies of articles, journals and references related to the Maritime Curriculum and observation, data analysis techniques using qualitative descriptive type. Based on the results of the research, the development of this maritime curriculum resulted in five indicators, including: 1) a marine-based curriculum; 2) curricular content based on community life patterns; 3) a problem-solving curriculum; 4) student skills development; and 5) public participation.

Keywords: *Maritime Curriculum; coastal society; nautical love.*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi guna mengkaji pengembangan gagasan atau kebijakan kurikulum di bidang maritim yang telah menjadi sebuah kebutuhan masyarakat khususnya yang berdomisili di kawasan pesisir utara Kabupaten Regency. Kurikulum ini sebagai salah satu upaya mendukung salah satu impian negara Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar dan Poros Maritim Dunia. Program kurikulum kemaritiman merupakan kebijakan yang memiliki tujuan mengenalkan potensi kelautan dan perikanan di kawasan pesisir Indonesia kepada generasi muda, agar membangkitkan semangat cinta bahari pada masyarakat pesisir terutama bagi siswa di sekolah pesisir. Metode Penelitian yang digunakan adalah kajian studi literatur terhadap artikel, jurnal maupun refrensi terkait mengenai pendidikan dan Kurikulum Maritim serta observasi lapangan. Teknik analisis data memakai jenis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pengembangan Kurikulum Maritim ini menghasilkan lima indikator diantaranya: 1) kurikulum berbasis kelautan; 2) konten kurikulum berdasarkan pola kehidupan masyarakat; 3) kurikulum berbasis pemecahan masalah; 4) pengembangan keterampilan siswa; dan 5) mendorong partisipasi publik.

Kata Kunci: *Kurikulum Maritim; masyarakat pesisir; cinta bahari.*

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan terbesar di dunia terletak di wilayah Asia Tenggara dengan wilayah laut berdaulat serta diakui oleh *United Nations Convention on The Law of Sea* (UNCLOS) dan Undang-Undang No.17 1985 tentang Pengesahan UNCLOS yang diresmikan menjadi negara kepulauan terbesar di dunia. Luas wilayah laut Negara Indonesia diperkirakan kurang lebih mencapai 6,65 juta km² atau sekitar 76,94% dari luas keseluruhan wilayah negara yang terdiri dari 17.499 pulau dan terbentang dari Sabang sampai Merauke.

Secara geografis Indonesia terletak pada di antara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia serta Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Oleh karena itu, Indonesia memiliki posisi yang strategis baik secara geopolitik maupun geoekonomi. Sebagai pusat alur pelayaran dan perdagangan dunia, Indonesia berperan penting dalam mengendalikan situasi politik dan keamanan regional dan dunia. Melalui sumber daya alam (SDA), sosial budaya dan posisi Geostrategis yang dimilikinya, sudah selayaknya Indonesia menjadi kiblat poros Maritim Dunia.

Indonesia memiliki sekitar sebelas sektor ekonomi kelautan yaitu: 1) perikanan tangkap; 2) budidaya perikanan; 3) industri pengolahan hasil perikanan; 4) industri bioteknologi kelautan; 5) pertambangan dan energi (ESDM); 6) pariwisata bahari; 7) hutan bakau; 8) perhubungan laut; 9) sumberdaya di pulau-pulau terpencil; 10) aktivitas industri dan sektor jasa di bidang maritime; dan 11) SDA non-konvensional (Khairunnas dan Desfandi, 2020).

Bila dilihat dari aspek sumberdaya, Indonesia memiliki potensi yang begitu melimpah tidak terkecuali SDA kelautan. Oleh karena itu, sebagai warga Indonesia yang memiliki rasa cinta bahari harus memiliki masyarakat yang mampu memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi SDA dengan maksimal serta berkelanjutan.

Kekayaan SDA dan jasa lingkungan kelautan Indonesia dapat diberdayakan untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa. Oleh karena itu, kekayaan SDA harus dikelola secara baik menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan agar bisa menjadi investasi bagi generasi bangsa di masa yang akan datang. Selain itu, kekayaan SDA juga diharapkan dapat diupayakan dan diimplementasikan ke

dalam ranah pendidikan berupa bentuk *output* kebijakan kurikulum (Supriyadi, 2018).

Apabila dilihat dari perkembangan Kurikulum dan Pendidikan di Indonesia, Kurikulum Nasional telah beberapa kali mengalami amandemen atau perubahan. Menurut Raharjo (2020) bahwa setelah Indonesia Merdeka, rancangan kurikulum pertama kali dibuat yaitu pada tahun 1947 yang bernama Rencana Pelajaran 1947, lalu kembali mengalami perombakan cukup besar yang terhitung sejak tahun 1950, 1958 hingga 1964. Pada tahun 1968 Kurikulum Pelajaran berganti nama menjadi Kurikulum 1968. Kurikulum 1968 selanjutnya diubah lagi menjadi Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, dan Kurikulum 1994. Kurikulum Berbasis Kompetensi Tahun 2004, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006, dan terbaru Kurikulum 2013.

Melalui sekian banyak perubahan kurikulum di Indonesia terutama pada saat era orde baru, pendekatan perubahan kurikulum yang digunakan adalah pendekatan *top down*. Hal ini dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang bersifat sentral. Kurikulum yang dikembangkan cenderung tidak memenuhi kebutuhan masyarakat terutama bagi yang tinggal di kawasan pesisir pantai (Sulistiyono, 2016). Hal ini menandakan bahwa kurikulum belum mampu menginovasi dan membuka ide kreativitas bagi guru atau peserta didik dalam mengembangkan pembelajaran.

Berdasarkan Data *Global Creativity Index* (Martin Prosperity Institute, 2015) bahwa tingkat kreativitas masyarakat Indonesia berada di peringkat 115 dari 139 negara. Survei dan penelitian tersebut menilai beberapa indikator guna mengetahui indeks kreativitas suatu negara diantaranya teknologi, *talent* dan toleransi.

Beberapa negara-negara berkembang lainnya diantaranya Malaysia dan Thailand, Thailand yang berada di peringkat lebih baik. Variabel yang digunakan dalam mengukur tingkat kreativitas tersebut adalah *creative class pollution*. *Creative class pollution* dapat diartikan sebagai porsi produktivitas masyarakat di berbagai sektor kehidupan dengan tuntutan kemampuan dalam memecahkan sebuah masalah. Dengan demikian sejatinya tingkat kreativitas masyarakat Indonesia dalam data *Global Creativity Index* (GCI) harus menjadi refleksi diri dan acuan motivasi sebagai usaha

memperbaiki kualitas SDA, diantaranya melakukan perubahan dalam menata sektor pendidikan.

Bidang Kemaritiman adalah salah satu aspek utama dalam pembangunan Indonesia pada abad milenial. Ini sesuai dengan cita-cita Negara Indonesia yang mempunyai impian menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Upaya untuk mencapai ini maka diperlukan visi untuk mendukung pembangunan bidang kemaritiman di level nasional. Selain itu juga membutuhkan diversifikasi kurikulum dengan memperkaya proses pendidikan dengan cara mengintegrasikan berbagai macam konten, keterampilan maupun keilmuan yang berkaitan erat dengan kemaritiman.

Pada kebijakan pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, sebagai upaya penguatan kualitas SDA. Kebijakan tersebut meliputi pembangunan pendidikan maritim, penguasaan bidang kemaritiman dan pengembangan serta pemanfaatan teknologi kelautan. Hal ini menunjukkan adanya sikap peduli terhadap perencanaan, pengelolaan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan wawasan kemaritiman serta mengembangkan potensi SDA. Sebagai tanggapan akan kebutuhan dan kebijakan tersebut maka Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bekerjasama dalam menggagas sebuah kebijakan program baru yaitu Kurikulum Maritim yang bertujuan mengembangkan potensi kemaritiman pada beberapa waktu kedepan.

Program kurikulum kemaritiman merupakan proyek kurikulum yang didasari oleh wawasan serta pengakuan sejarah maritim, budaya bahari, dan potensi kemaritiman untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan berjiwa patriot serta memiliki karakter maritime. Program ini bertujuan untuk membangun masyarakat Indonesia yang memiliki kapabilitas maupun daya saing global menuju pencapaian kejayaan Indonesia sebagai bangsa dan Negara maritime yang mandiri, maju, kuat dan mengedepankan asas pembangunan berkelanjutan (Indrawanto, 2013).

Program kurikulum kemaritiman merupakan kebijakan yang memiliki tujuan mengenalkan potensi kelautan dan perikanan di kawasan pesisir Indonesia kepada generasi

muda agar membangkitkan semangat cinta bahari pada masyarakat pesisir terutama bagi siswa di sekolah pesisir. Oleh karena itu diperlukan rancangan atau kebijakan pengembangan kurikulum di bidang kemaritiman yang muatannya berorientasi terhadap semua jenjang pendidikan mulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat dalam mencapai misi pembangunan Indonesia (Sampono, 2015). Hal ini diperkuat dengan pendapat Junida (2017) bahwa pengembangan dan penerapan kurikulum di bidang kemaritiman meliputi kegiatan pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum pendidikan yang diterapkan pada semua jenjang sebagai sarana mengembangkan pengetahuan, nilai keterampilan, dan sikap yang mendukung pembangunan kemaritiman.

Pelaksanaan program Kurikulum Maritim sejatinya telah dimulai sejak tahun 2018 dengan plot di 13 lokasi yaitu Aceh, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Bengkulu, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Nusa Tenggara Timur dan Papua Barat. Pada Tahun 2019 plot kurikulum kemaritiman meluas hingga di 21 lokasi yaitu Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, D.I Yogyakarta, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Papua (Khairunnas dan Desfandi, 2020).

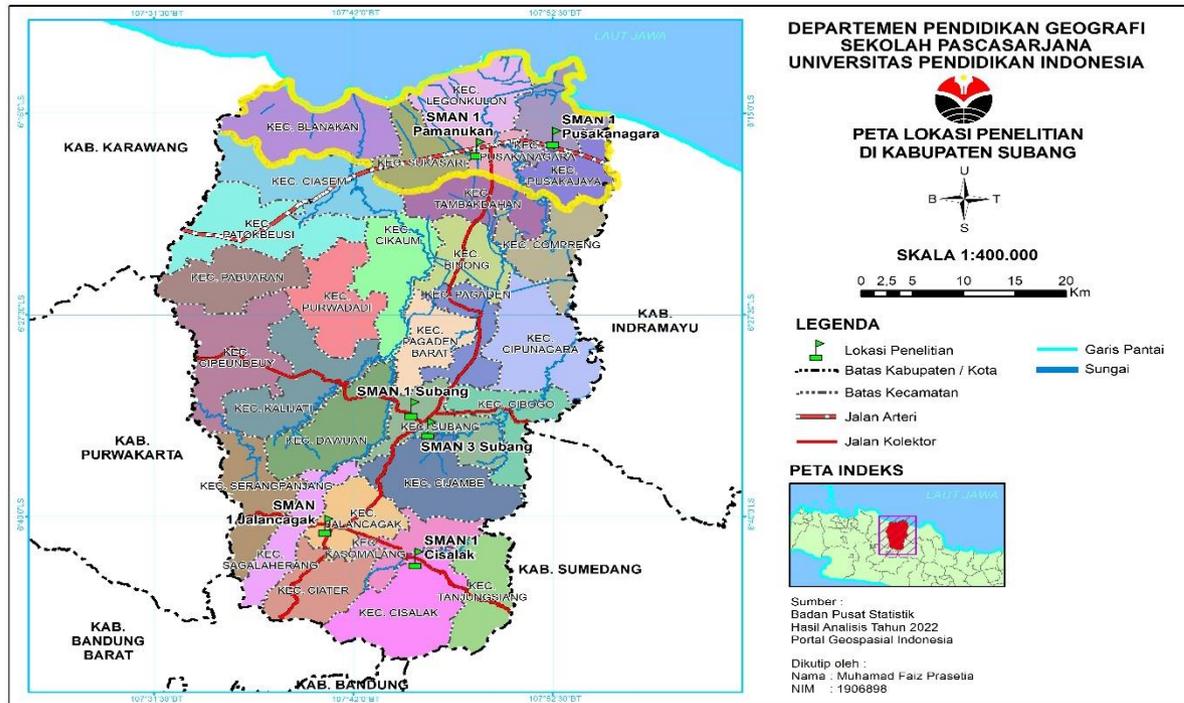
Kota Subang Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu lokasi dari plot lokasi tersebut yang mengimplementasikan kurikulum kemaritiman guna melatih dan mengembangkan SDA yang mumpuni. Penelitian ini dilakukan dengan adanya asumsi perlu adanya desain kurikulum yang sesuai perkembangan zaman, kepentingan nasional maupun di bidang Industri, penting rasanya melakukan penelitian mengenai pengembangan kurikulum bidang maritim di pantai utara Jawa Barat khususnya Kabupaten Subang.

METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi literatur dengan cara menyimpulkan (bahan-bahan materi) yang bersumber dari buku, jurnal, dan sumber lainnya terkait ilmu tentang penelitian dan

pengembangan kurikulum serta menggunakan data kualitatif. Adapun metode yang digunakan yaitu metode survei lapangan. Survei lapangan dilakukan untuk memperoleh data kualitatif tentang rencana pengembangan Kurikulum Maritim.

Lokasi penelitian berada di daerah pesisir utara Kabupaten Subang (Gambar 1). Snelis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dalam menjabarkan indikator desain kurikulum bidang kemaritiman.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian (Ina - Geoportal, 2022)

HASIL PENELITIAN

Kajian Pengembangan Kurikulum Maritim

Penyusunan desain Kurikulum Maritim dilakukan dengan kajian secara mendalam yang mengacu dan mengadaptasi pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Farchan dan Muhtadi (2019) mengenai Pengembangan desain Kurikulum Maritim di Jepara. Terdapat lima indikator dalam membuat kebijakan Kurikulum Maritim yaitu: 1) Kurikulum untuk Potensi Kelautan; 2) Kurikulum berdasarkan Pola Kehidupan Masyarakat; 3) Pemecahan Masalah; 4) Pengembangan Keterampilan Siswa; dan 5) Partisipasi Publik.

Kurikulum Berbasis Potensi Kelautan

Kekayaan alam di bidang kelautan dan isinya menjadi kunci dalam menunjang kebutuhan utama masyarakat terutama bagi masyarakat kawasan pesisir. Pengembangan potensi kelautan dilakukan dengan sistem konservasi, pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan efektif yang didesain secara sistematis. Melihat indikator yang dibutuhkan di atas, dengan demikian diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten, memahami, menguasai potensi kelautan. Adapun sub-indikator Kurikulum Berbasis Potensi Kelautan ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sub-Indikator Kurikulum Berbasis Potensi Kelautan

No	Sub-Indikator
1	Kajian budidaya tangkap pengolahan ikan
2	Memuat program pengelolaan tambak garam
3	Memuat program pelatihan melaut dan perakitan alat tangkap berbasis teknologi kepada calon taruna pelaut
4	Memuat program pelatihan perbaikan kapal
5	Kegiatan sosialisasi pelestarian sumber daya kelautan

Sumber: Hasil Analisis Data Primer, 2023.

Tujuan model kurikulum bidang kemaritiman yang mengarah pada upaya pengembangan potensi kelautan harus memiliki indikator yang sudah terukur. Selain itu indikator harus bersifat sinergi dengan indikator lainnya sehingga upaya pengembangan potensi kelautan dapat diterapkan secara efektif.

Materi Kurikulum berdasarkan Pola Kehidupan Masyarakat Pesisir

Kurikulum harus sesuai dengan fakta dalam kehidupan di lapangan dan kebutuhan masyarakat. Proses pendidikan tidak boleh

memisahkan siswa dan lingkungan, namun harus mensinergikan keduanya sebagai media untuk berkembang dan tumbuh dengan lingkungan. Oleh sebab itu isi dalam kurikulum dituntut dapat memberikan peluang dan ruang kepada siswa untuk belajar mengenai berbagai macam permasalahan di sekitar lingkungan masyarakat dan berkesempatan untuk memecahkan masalah sekaligus mampu menerapkan kedalam kehidupan sehari-hari. Materi kurikulum berdasar pada pola kehidupan masyarakat dikembangkan dalam empat sub-indikator yang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Sub-Indikator Materi Kurikulum Berdasarkan Pola Kehidupan Masyarakat Pesisir

No	Sub- Indikator
1	Kebutuhan masyarakat berdasarkan hasil analisis kebutuhan
2	Menyediakan sarana prasarana belajar secara terbuka
3	Menjadikan laut dan kehidupan masyarakat pesisir sebagai salah satu sumber belajar siswa
4	Mengakomodir kepentingan masyarakat dan memahami potensi lingkungan

Sumber: Hasil Analisis Data Primer, 2023.

Kurikulum Berbasis Pemecahan Masalah

Kurikulum bidang kemaritiman berfokus terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Maka melalui interaksi dan kolaborasi, peserta didik didorong untuk mampu memecahkan masalah ditandai dengan

mengembangkan dan menguasai kompetensi berupa sikap, pengetahuan, keterampilan berfikir dan aspek psikomotor yang dikemas dalam pengalaman belajar. Kurikulum berbasis Pemecahan masalah dikembangkan menjadi lima sub-indikator tersaji dalam Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Sub-Indikator Kurikulum Berbasis Pemecahan Masalah

No	Sub- Indikator
1	Merangsang siswa dalam menunjukkan pemahaman masalah kelautan
2	Menyajikan data dan informasi teraktual dalam memecahkan masalah kelautan
3	Menyajikan masalah secara sistematis
4	Menyusun strategi pemecahan masalah
5	Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah kelautan secara komperhensif

Sumber: Hasil Analisis Data Primer, 2023.

Pengembangan Keterampilan Siswa

Desain kurikulum bidang kemaritiman berorientasi pada potensi, pengembangan dan kepentingan siswa. Prinsip dasarnya bahwa siswa berada di posisi sentral dan aktif dalam kegiatan pembelajaran, maka siswa layak memperoleh fasilitas untuk menguasai konten

atau tema secara keseluruhan dalam bentuk bekal kecakapan hidup dan dibimbing mampu mengaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Komponen keterampilan dan kecakapan hidup siswa dikembangkan menjadi lima sub-indikator yang dapat dilihat pada Tabel 4 dibawah.

Tabel 4. Sub-Indikator Kurikulum Pengembangan Keterampilan Siswa

No	Sub- Indikator
1	Keterampilan membudidaya tangkap pengolahan & pengawetan hasil tangkap
2	Keterampilan pengelolaan tambak garam
3	Keterampilan melaut berbasis teknologi dan inovasi alat tangkap kepada calon taruna pelaut
4	Keterampilan bidang teknik perkapalan
5	Pelestarian sumber daya kelautan dan pengelolaanya

Sumber: Hasil Analisis Data Primer, 2023.

Partisipasi Publik

Pembuatan kebijakan ataupun program tentu perlu adanya pengaruh partisipasi, baik dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM) hingga Pemerintah. Fenomena disebabkan eksistensi praktik pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Kebijakan merancang program kurikulum

kemaritiman memberi ruang kolaborasi dan partisipasi berbagai pihak mulai dari orang tua, masyarakat, ahli kelautan hingga pemerintah untuk berperan aktif menyusun kurikulum berbasis maritim. Upaya mendorong partisipasi publik, desain kurikulum bidang kemaritiman dikembangkan dalam empat sub-indikator seperti pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Sub-Indikator Mendorong Partisipasi Publik

No	Sub-Indikator
1	Membuka peluang bagi orang tua siswa untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran ,maupun diluar pembelajaran
2	Memfasilitasi masyarakat sebagai sumber belajar
3	Menjalin komunikasi dengan pemerintah dan pihak swasta bertujuan pengembangan kurikulum
4	Memberdayakan produk siswa bagi kepentingan bersama

Sumber: Hasil Analisis Data Primer, 2023.

PEMBAHASAN

Kuriikulum Maritim dalam Membangkitkan Cinta Bahari Siswa

Kebijakan dalam merancang kurikulum ini dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor diantaranya siswa yang menjadi pemeran dalam pelaksanaan Kurikulum Maritim. Oleh karena itu pengaruh faktor pendidikan dinilai sebagai bagian dari pola kehidupan siswa. Maka pengembangan kurikulum kemaritiman menekankan siswa sebagai subjek dalam pembelajaran.

Secara harfiah pengembangan Kurikulum Maritim memiliki esensi atau tujuan mengembalikan makna dari pendidikan dimana kebutuhan siswa menjadi prioritas utama dalam menumbuhkan potensi, minat serta kebutuhan siswa dengan lingkungannya. Ini bertujuan membuat siswa tidak merasa asing dengan lingkungannya, namun dapat memberikan rasa sinergitas yang begitu erat dengan kehidupan sehari-hari, memahami problematika, mampu memanfaatkan keterampilan dalam memecahkan masalah dalam bidang maritim atau kelautan sehingga diharapkan rasa cinta bahari yang ada pada diri siswa dapat berkembang.

Upaya tersebut dilakukan untuk menghasilkan profit kompetensi siswa yang memiliki kelebihan unggul dalam hal karakter selaras dengan peran maupun bertanggung jawab di kehidupan sehari-hari, dapat bergaul dan bersosialisasi melakukan pertukaran pendapat dengan masyarakat, memiliki keahlian memecahkan masalah dan

menerapkan keterampilan kemaritiman dalam kehidupan sehari-hari.

Pengembangan dan Implementasi Kurikulum Maritim di Indonesia

Sekolah serta pemerintah memiliki peran penting dalam pengembangan serta implementasi Kurikulum Maritim. Oleh karena itu diperlukan adanya sinergitas antara pihak satu dengan yang lain, akan tetapi faktanya dalam proses pengembangan serta implementasi Kurikulum Maritim di lapangan sering menemui berbagai kendala.

Studi yang dilakukan Khairunnas dan Desfandi (2020) mengungkapkan program penerapan Kurikulum Maritim di SMK Negeri 1 Sabang, Provinsi Aceh belum terlaksana dengan baik dikarenakan beberapa faktor diantaranya anggaran yang minim, terjadinya *miscommunication* antara pemerintah terkait dengan sekolah mengenai tujuan program, dan kurangnya kompetensi guru serta mata pelajaran yang dapat diintegrasikan dengan ilmu kemaritman. Begitu pula penelitian Supriadi dkk. (2023) yang bahwasanya implementasi kurikulum masih banyak menemui kendala di lapangan. Implementasi Kurikulum Maritim sebagai standar kurikulum operasional SMK Negeri 1 Alas di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat belum bisa dilakukan secara maksimal dikarenakan terbatasnya proses pendampingan kurikulum, peran stakeholder yang belum optimal serta kualitas SDM dalam pendampingan kurikulum yang dinilai masih kurang.

Program implementasi Kurikulum Maritim yang dilakukan juga tidak hanya menemui masalah di tingkat pendidikan SMA tetapi juga di tingkat pendidikan PAUD. Fakta tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Samad dkk. (2023) mengenai penerapan Kurikulum Maritim pada jenjang PAUD di Maluku Utara bahwa tahap penerapan Kurikulum Maritim mengalami banyak kendala diantaranya faktor kualitas serta ketersediaan sumber daya guru yang masih kurang, dan *misscoordination* antara sekolah, dinas terkait dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu wilayah yang menjadi pilot untuk menjalankan program pengembangan dan implementasi Kurikulum Maritim. Kabupaten Subang sendiri merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi besar di bidang kelautan khususnya di wilayah pesisir pantai utara. Oleh karena itu, pemerintah setempat memiliki rencana untuk mengembangkan kurikulum mengenai kemaritiman sejak 2019 akan tetapi hingga tahap pengembangannya relatif berjalan lambat dan belum efektif dikarenakan masih banyak sekolah yang belum memahami, mengetahui serta melaksanakan Kurikulum Maritim. Di Kabupaten Subang diketahui hanya satu lembaga politeknik pendidikan maritim yang yang bisa mengelola sumber daya kemaritiman dengan Kurikulum Maritim sebagai pondasi pembelajarannya (Prasetya dan Budi, 2019).

Pengembangan Kurikulum Maritim di Kabupaten Jepara telah menunjukkan tahap perkembangan yang signifikan. Hal itu dibuktikan dimana Kurikulum Maritim telah dibuat serta dimuat dalam standar kurikulum Diversifikasi KOSP Kemaritiman SKB Jepara (Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan SKB Jepara, 2023). Pada muatan kurikulum tersebut, kegiatan pembelajaran berfokus terhadap pengembangan potensi sumberdaya kelautan yang ada di Kabupaten Jepara yang didukung oleh kondisi Geografisnya sebagai daerah pesisir. Melalui instansi terkait seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pendidikan setempat bekerjasama dengan pihak sekolah dari berbagai jenjang dari PAUD hingga SMA sederajat merasa perlu memuat sebuah kurikulum lokal yang dapat mengintegrasikan Kurikulum Merdeka dengan konsep maritime. Ini bertujuan membentuk karakter siswa sesuai dengan enam dimensi dalam penguatan projek profil pelajar Pancasila (P5) dengan beberapa mata pelajaran yang

diintegrasikan dengan konten kemaritiman dan dapat menciptakan SDM yang unggul di bidang kemaritiman dalam mengelola sumber daya kelautan secara arif dan bijak serta menggunakan konsep pembangunan berkelanjutan. Pengembangan Kurikulum Maritim di Jepara menjadi salah satu contoh pentingnya bagaimana komunikasi serta kerjasama dari berbagai pihak dalam tahap pengembangan serta implementasi kurikulum yang baik.

Dari segala fenomena dan fakta yang terjadi di beberapa wilayah di atas, penulis melihat implementasi serta pengembangan kurikulum berbasis kemaritiman masih belum terlaksana dengan baik dan optimal. Oleh karena itu diperlukan adanya pelatihan secara mendalam yang diperuntukkan bagi fasilitator pendidikan serta guru mulai dari tingkat PAUD hingga SMA/ sederajat sebagai wadah agar pengembangan Kurikulum Maritim bisa dilakukan secara maksimal. Lebih lanjut baik dari pihak terkait seperti Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hingga Dinas Pendidikan serta Sekolah diharapkan memiliki sinergi satu sama lain dengan mengadakan koordinasi dan melakukan sosialisasi mengenai Kurikulum Maritim dan ilmu kelautan terutama terhadap masyarakat pesisir di wilayah yang berpotensi besar di bidang sumber daya kelautan.

KESIMPULAN

Desain Kurikulum Maritim memuat lima indikator diantaranya: 1) Kurikulum berbasis Kelautan; 2) Konten Kurikulum Berbasis Pola Kehidupan Masyarakat; 3) Menggunakan Pendekatan Pemecahan Masalah; 4) Pengembangan Keterampilan Siswa; dan 5) Mendorong Partisipasi Publik.

SARAN

Sebagai upaya lebih lanjut perlu adanya kajian dan pengembangan lebih lanjut mengenai kerangka dari Kurikulum Maritim, diantaranya: 1) perlu adanya konsep pendidikan yang mengakomodir kebutuhan masyarakat terutama potensi sumberdaya lingkungan; 2) perlu adanya kajian pengembangan serta penelitian lebih mendalam pada setiap jenjang pendidikan sekolah mulai dari PAUD hingga SMA/ sederajat. Agar dapat diketahui layak atau tidaknya kurikulum ini dapat digunakan sebagai acuan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. Enok Maryani, M.S dan Prof. Dr. Mamat Ruhimat, M.Pd selaku pembimbing penelitian ini serta *reviewer* dan editor Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi.

DAFTAR PUSTAKA

- Prasetya, A. W., dan Budi, K. (2019). Sekolah Maritim Standar Internasional Akan Hadir di Patimban. <https://regional.kompas.com/read/2019/10/19/13264141/sekolah-maritim-standar-internasional-akan-hadir-di-patimban?page=all> (Diakses, 13 Juli 2023).
- Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan SKB Jepara. (2023). Kurikulum Berseri Bersahabat dengan Bahari. <https://anyflip.com/sljng/ycab/basic> (Diakses, 13 Juli 2023).
- Farchan, A., dan Muhtadi, A. (2019). Pengembangan Desain Kurikulum Maritim di Jepara. *Indonesian Journal of Curriculum and Educational Technology Studies*, 7(1), 27-36.
- Indrawanto, S. (2013). Pendidikan Karakter Maritim Sebagai Upaya Memperkuat Jiwa Kemaritiman di Tingkat Satuan Pendidikan Yayasan Hang Tuah. *Jurnal GENTA Prodi Pendidikan Sejarah*, 2(1).
- Junida, A. I. (2017). Kemendikbud-Kemenko Maritim Kerjasama Terapkan Kurikulum Kemaritiman. <https://www.antaranews.com/berita/627472/kemendikbud-kemenko-maritim-kerja-sama-terapkan-kurikulum-kemaritiman> (Diakses, 19 Mei 2020).
- Khairunnas, R., dan Desfandi, M. (2020). Implementasi Program Kurikulum Kemaritiman di SMK Negeri I Kota Sabang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Geografi*, 5(2), 115-124.
- Martin Prosperity Institute. (2015). *The Global Creativity Index 2015*. Canada: University of Toronto's Rotman School of Management.
- Presiden Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia*. Jakarta.
- Samad, F., Yetti, E., dan Hapidin. (2023). Maritime Curriculum Policy for Early Childhood in North Maluku. *Scientia*, 2(2), 27-31. <https://doi.org/10.51773/sssh.v2i2.225>
- Sampono, N. (2015). *Implementasi Kurikulum Kebaharian Dalam Sistem Pendidikan Nasional*. disampaikan pada acara Seminar "Evaluasi Implementasi Kurikulum Longitudinal Kebaharian" yang diselenggarakan oleh Yayasan Hang Tuah, pada tanggal 19 Agustus 2015, bertempat di Wisma Elang Laut, Jakarta.
- Sulistiyono, S. T. (2016). Paradigma maritim dalam membangun Indonesia: Belajar dari sejarah. *Lembaran Sejarah*, 12(2), 81-108.
- Supriadi, F., Wibowo, D. H., & Afgani, C. A. (2023). Analisis Implementasi Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan Berbasis Kemaritiman di SMK Negeri 1 Alas Kabupaten Sumbawa. *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 6(1), 421-434.
- Supriyadi. (2018). Pentingnya Penanaman Budaya Maritim Sejak Dini sebagai Bentuk Kewaspadaan Nasional dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. Bogor: Universitas Pertahanan Indonesia.
- Raharjo, R. (2020). Analisis perkembangan kurikulum PPKn: dari Rentjana pelajaran 1947 sampai dengan merdeka belajar 2020. *PKn Progresif: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Kewarganegaraan*, 15(1), 63-82.